

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis UMKMS

¹Muhammad fajrun rahman, ²Masad,

1Program studi Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
Corresponding Author. Email : muhammadfajrurrahmat@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received 27-01-2025

Revised 20-02-2025

Accepted 23-03-2025

Online 25-03-2025

Keywords:

Community Welfare,
Economic Empowerment,
Based on MSMEs

ABSTRACT

Abstract: Economic empowerment is a crucial aspect of regional development. One of the most effective ways to improve community welfare is by fostering the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs play a strategic role in job creation, poverty reduction, and strengthening the local economy. Therefore, this community service program aims to support MSME development through training, mentoring, and access to financing. In the digital era, MSMEs must adapt to technological advancements to remain competitive. However, many MSME entrepreneurs still face challenges such as limited digital literacy, restricted market access, and difficulties in securing business capital. Thus, this program is designed to provide comprehensive and sustainable solutions to these issues, ensuring long-term growth and resilience for MSMEs.

Keyword: Community Welfare, Economic Empowerment, Based on MSMEs

Abstrak: Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu daerah. Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan perekonomian lokal. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan. Dalam era digital seperti saat ini, UMKM harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap kompetitif. Banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi digital, keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas, serta sulitnya mendapatkan modal usaha. Oleh sebab itu, program pengabdian ini dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi, Berbasis UMKMS

A. LATAR BELAKANG

Dalam era digital seperti saat ini, UMKM harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap kompetitif. Banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi digital, keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas, serta sulitnya mendapatkan modal usaha (Hidayat & Kholik, 2024). Oleh sebab itu, program pengabdian ini

dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam era digital seperti saat ini, UMKM harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap kompetitif (Salam & Imilda, 2024; Vera Maria et al., 2024). Banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi digital, keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas, serta sulitnya mendapatkan modal usaha. Oleh sebab itu, program pengabdian ini dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai program dan bidang kegiatan. Salah satu bentuk pemberdayaan yakni melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM menjadi salah satu pilar utama bagi ekonomi negara. Usaha mikro kecil menengah merupakan pondasi ekonomi di Indonesia (Maulida & Yunani, 2017; Putri Salsabila Indrawan Lubis & Rofila Salsabila, 2024). UMKM berperan penting dalam sistem ekonomi yang berorientasi pada rakyat, dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas jangkauan ekonomi rakyat, serta memberikan kontribusi berarti dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan terhadap krisis moneter. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, keterlibatan, dan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan, serta mengelola sumber daya dan potensi yang ada di lingkungan mereka. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat juga mengutamakan prinsip kesetaraan, partisipasi aktif, dan kemandirian dalam mengelola urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat diberi kepercayaan untuk menentukan jalannya pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Menurut (Bakrie et al., 2024) terdapat dua arah dalam pemberdayaan, yang pertama adalah pemberian wewenang, kekuasaan, dan kapasitas kepada masyarakat agar mereka menjadi lebih kuat. Sedangkan arah kedua lebih fokus pada motivasi dan dorongan yang menjadi pilihan individu dalam mengelola kehidupannya. Walaupun begitu, tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing individu.

Pemberdayaan masyarakat, dalam pengertian konseptualnya, adalah upaya sosial dari warga dalam suatu komunitas untuk bersatu dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan bersama guna mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya (Kader, 2018).

Dalam perspektif lain, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menggabungkan nilai-nilai sosial. Ide ini mencerminkan pendekatan baru dalam pembangunan yang menekankan pada fokus pada manusia, partisipasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan

Pemberdayaan masyarakat secara umum ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang berada dalam situasi rentan dan lemah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setelah mengalami pemberdayaan, mereka akan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk sandang, pangan, dan papan. Selain itu, diharapkan bahwa masyarakat juga dapat mengakses sumber daya produktif yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mendapatkan barang/jasa dengan kualitas yang baik. Dalam konteks ini, diinginkan agar masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Jadi, inti dari konsep pemberdayaan adalah memberikan atau meningkatkan daya atau kekuatan kepada orang atau kelompok tertentu sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mengambil kontrol atas kehidupan mereka.

B. METODE PELAKSANAAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini merujuk pada sektor usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, baik dari segi jumlah karyawan, omset, maupun aset yang dimilikinya. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena mereka menyumbang sebagian besar lapangan kerja dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Definisi UMKM telah diatur melalui UU No. 9 Tahun 1999, namun mengingat dinamika perkembangan yang semakin cepat, perubahan dilakukan melalui Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro merupakan usaha yang merujuk pada bisnis produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, yang memenuhi syarat sebagai Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Kecil sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang

Metode Pelaksanaan Program ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Identifikasi Kebutuhan

- a. Melakukan survei kepada pelaku UMKM untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

- b. Menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan, seperti pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, atau akses permodalan.
 - c. Mengkategorikan UMKM berdasarkan sektor usaha dan skala bisnis untuk pendekatan yang lebih tepat.
- 2. Pelatihan dan Pendampingan**
- a. Mengadakan pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan digitalisasi usaha.
 - b. Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
 - c. Menyediakan mentor dari kalangan akademisi dan praktisi bisnis untuk membantu UMKM dalam menyusun strategi pengembangan usaha.
- 3. Akses Permodalan dan Pemasaran**
- a. Membantu UMKM dalam mengakses program pinjaman berbunga rendah atau hibah dari pemerintah maupun lembaga swasta.
 - b. Membuka jaringan pemasaran melalui e-commerce dan media sosial untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
 - c. Menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas melalui kerja sama dengan platform marketplace.
- 4. Monitoring dan Evaluasi**
- a. Melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan UMKM setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan.
 - b. Mengadakan forum diskusi dan konsultasi berkala untuk menampung permasalahan yang muncul.
 - c. Mengukur dampak program terhadap peningkatan pendapatan dan skala usaha UMKM

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini merujuk pada sektor usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, baik dari segi jumlah karyawan, omset, maupun aset yang dimilikinya. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena mereka menyumbang sebagian besar lapangan kerja dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Putri Salsabila Indrawan Lubis & Rofila Salsabila, 2024; Syahputra et al., 2023).

Definisi UMKM telah diatur melalui UU No. 9 Tahun 1999, namun mengingat dinamika perkembangan yang semakin cepat, perubahan dilakukan melalui Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, definisi UMKM dapat diuraikan sebagai berikut Usaha Mikro merupakan usaha yang merujuk pada bisnis produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, yang memenuhi syarat sebagai Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, keterlibatan, dan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan, serta mengelola sumber daya dan potensi yang ada di lingkungan mereka (Ismail et al., 2023). Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat juga mengutamakan prinsip kesetaraan, partisipasi aktif, dan kemandirian dalam mengelola urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri.

Dalam pengertian yang lebih luas, (Radjamin & Hermawan, 2024) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses meningkatkan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan turut serta dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan dalam konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai program dan bidang kegiatan. Salah satu bentuk pemberdayaan yakni melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Sunariani et al., 2017) . UMKM menjadi salah satu pilar utama bagi ekonomi negara. Usaha mikro kecil menengah merupakan pondasi ekonomi di Indonesia. UMKM berperan penting dalam sistem ekonomi yang berorientasi pada rakyat, dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas jangkauan ekonomi rakyat, serta memberikan kontribusi berarti dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan terhadap krisis moneter (Dharmajaya et al., 2023; Putri Salsabila Indrawan Lubis & Rofila Salsabila, 2024).



Gambar I : Hasil Produk UMKM Bersama TIM

Partisipasi Aktif Masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada tingkat partisipasi aktif dari anggota masyarakat. Mereka perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan. Ketersediaan Sumber Daya seperti dana, tenaga ahli, infrastruktur, dan akses ke informasi merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, program pemberdayaan masyarakat mungkin sulit untuk dilaksanakan. Pendidikan dan pengetahuan masyarakat merupakan faktor kunci dalam membangun kapasitas dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil peran aktif dalam program pemberdayaan. Kemitraan dan Kolaborasi. Kerja sama dengan pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dapat memperluas jangkauan dan memperkuat efektivitas program pemberdayaan.

Pemimpin dan Fasilitator Komunitas yang Kuat. Keberadaan pemimpin atau fasilitator yang memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat membantu memandu dan memobilisasi partisipasi aktif. Keterlibatan Pemerintah Lokal. Dukungan dan keterlibatan pemerintah lokal sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Fleksibilitas dan Responsif terhadap Perubahan. Program pemberdayaan masyarakat perlu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat untuk tetap relevan dan efektif. Setiap konteks masyarakat memiliki karakteristik unik, oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lokal. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, diharapkan dapat

meningkatkan kesempatan keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan merujuk pada proses atau upaya untuk meningkatkan atau memperluas sesuatu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, budaya, teknologi, atau infrastruktur. Pengembangan seringkali bertujuan untuk mencapai kemajuan, pertumbuhan, atau perbaikan dalam suatu bidang atau wilayah tertentu. Dalam konteks bisnis atau ekonomi, pengembangan juga dapat merujuk pada upaya untuk memperluas atau meningkatkan usaha atau proyek tertentu. Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merujuk pada serangkaian upaya atau strategi untuk meningkatkan dan memperluas usaha-usaha kecil dan menengah (Dharmajaya et al., 2023). Tujuan pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan UKM dan UMKM adalah dari cakupannya. UKM merupakan singkatan dari Usaha Kecil Menengah yang cakupannya pada unit usaha skala kecil dan menengah. Sedangkan UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM lebih fokus pada cakupan unit usaha skala mikro. Walaupun secara definisi berbeda, namun pemerintah lebih sering menggunakan istilah UMKM karena dianggap lebih mewakili ketiga unit usaha yang dibahas pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Perbedaan lain dari UKM dan UMKM adalah dari pembinaan dan pemberdayaan. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina oleh Kabupaten dan Kota. Sedangkan Unit Usaha Kecil diurus oleh provinsi. Usaha menengah berskala nasional dibina langsung oleh pemerintah pusat. Perbedaan UKM dan UMKM juga terlihat dari sisi yuridis. Usaha mikro tidak memerlukan badan hukum. Sedangkan Usaha Kecil dan Menengah wajib memiliki dasar hukum. Demikian penjelasan mengenai pengertian UKM dan UMKM serta perbedaannya. Usaha skala mikro, kecil, dan menengah punya peranan sangat penting dalam memajukan perekonomian Indonesia (Ismail et al., 2023; Munthe et al., 2023). Semakin banyak UKM dan UMKM di Indonesia, maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang diserap. Tetap semangat menjalani bisnis, di manapun Anda berada. Jika membutuhkan produk untuk mendukung bisnis, Bhinneka siap membantu Anda.

Pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan UMKM adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di Kelurahan Watang Bacukiki dengan berfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dilakukan oleh Pemerintah lokal yakni Kelurahan Watang Bacukiki yang bekerja sama pihak Dinas Tenaga. Bantuan yang diberikan untuk UMKM untuk saat ini hanya berfokus

pada bantuan berupa alat produksi yang sesuai usaha pelaku UMKM, dimana pihak Dinas Tenaga Kerja memberikan bantuan berupa barang kepada masyarakat yang membutuhkan untuk melaksanakan atau mengembangkan usaha mereka.

Dalam identifikasi kebutuhan akan dicari tahu terkait apa yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan usaha mereka melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang dihadiri oleh ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), pihak/staff kelurahan Watang Bacukiki, pihak dari Kecamatan Bacukiki. Bagi pelaku UMKM dapat menyampaikan dan mengajukan kepada ketua RT terkait kegiatannya yang membutuhkan bantuan, jadi saat dilaksanakan musyawarah kelurahan RT dan RW akan mengajukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung usaha mereka. Pendekatan melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan program ini adalah cara yang sangat efektif untuk mendengarkan dan mencatat kebutuhan masyarakat, terutama pelaku UMKM. Dengan demikian, keputusan dan program bantuan dapat lebih tepat sasaran.

Mengajukan Bantuan Hasil musyawarah kelurahan selanjutnya di ajukan ke Dinas Tenaga Kerja Parepare melalui Pagu Wilayah, Pengajuan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi termasuk jenis bantuan yang dibutuhkan. Tahap memastikan bahwa hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) terintegrasi ke dalam sistem formal pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Watang Bacukiki, program bantuan UMKM yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan pemerintah Kelurahan Watang Bacukiki memiliki dampak positif yang signifikan. Melalui bantuan ini, sejumlah pelaku UMKM berhasil mendapatkan bantuan berupa barang atau alat-alat produksi, sehingga mampu meningkatkan produksi dan kualitas produk mereka. Selain itu, program ini juga mendorong kolaborasi antar pelaku UMKM dan memperkuat jaringan bisnis di wilayah tersebut. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini. Adanya keterbatasan dana atau anggaran dari pihak Dinas Tenaga kerja sehingga jumlah bantuan yang diajukan terkadang tidak sesuai jumlah yang diinginkan. Oleh karena itu, Pemerintah akan memilih bantuan yang sangat dibutuhkan (prioritas) dan memiliki dampak besar terhadap pelaku UMKM dan komunitas secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan UMKM di Kelurahan Watang Bacukiki telah membawa manfaat yang positif bagi para pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Dengan adanya upaya berkelanjutan dan peningkatan akses terhadap pasar, diharapkan program ini dapat terus memberikan dampak yang berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Usaha Menengah adalah aktivitas ekonomi produktif yang beroperasi secara independen, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak tergolong sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau merupakan bagian dari Usaha Kecil atau Usaha Besar baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini. UMKM) digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh suatu usaha. Berikut adalah kriteria klasifikasi UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008.

Perkembangan teknologi yang pesat membuat usaha di bidang ini mampu berkembang lebih pesat. Bisnis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena komunikasi jadi kebutuhan primer. Terlebih untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan, kebutuhan teknologi dan internet jauh lebih besar. Contoh dari UKM teknologi dan internet yang paling banyak ditemukan adalah pengembang aplikasi smartpone.

UCAPAN TERIMA KASIH

Program pengabdian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelatihan yang tepat, akses permodalan yang memadai, dan dukungan pemasaran yang kuat, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu saya menyampaikan ucapan terima kasih terhadap semua kalangan yang telah membantu untuk kelancaran kegiatan ini.

REFERENSI

- Bakrie, R. R., Atikah Suri, S., Nabila, Sahara, A., H Pratama, V., & Firmansyah. (2024). Pengaruh Kreativitas UMKM Serta Kontribusinya Di Era Digitalisasi Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 82–88. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.308>
- Dharmajaya, M. A., Haykal, H., & Seftiadi, Y. (2023). Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 164–177. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2.688>
- Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 70–84. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5052>
- Ismail, K., Rohmah, M., & Ayu Pratama Putri, D. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu*

Ekonomi Akuntansi, 7(2), 208–217. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>

Kader, M. A. (2018). peran ukm dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di indonesia. *jurisma: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995>

Maulida, S., & Yunani, A. (2017). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–196. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/155/864>

Munthe, A., M. Yarham, & Ridwana Siregar. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 593–614. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>

Putri Salsabila Indrawan Lubis, & Rofila Salsabila. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91–110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>

Radjamin, I. P., & Hermawan, J. (2024). hubungan antara pengguna internet, produk domestik bruto per kapita dan tingkat ketenagakerjaan dalam perspektif e-commerce. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 160–169. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4020>

Salam, A., & Imilda. (2024). Transformasi Digital UMKM Indonesia di Era Industri 5.0: Studi Kasus di Kota Banda Aceh. *Jurnal Manajemen Dan Teknologi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.63447/jmt.v1i1.772>

Sunariani, N. N., Suryadinata, A. O., & Mahaputra, I. I. R. (2017). Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through Fostered Programs in the Province of Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 1–20.

Syahputra, A., Harahap, I., Kaswinata, & Nawawi, Z. M. (2023). *The Significance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Economic Development in the City of Medan from an Islamic Perspective*. 6(November), 718–728.

Vera Maria, Ahmad Fauzan Aziz, & Depi Rahmawati. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM Lokal melalui Strategi Pemasaran Digital di Era Digital. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 208–220. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i2.3471>